



Kondisi Demokrasi Indonesia Antara Harapan dan Kekhawatiran Pasca Pemilu 2024

M Salman Alfariji

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Korespondensi penulis: salfaraz12345@gmail.com

Abstract. Indonesia's democracy has been at the center of intense debate in recent years, with many parties criticizing its increasingly fragile and threatened state. This article aims to analyze why Indonesian democracy is considered destroyed by some parties. First, the analysis begins by examining the decline in the quality of democracy which is reflected in the classification of Indonesian democracy in the implementation of its government. Data showing a decline in civil liberties, suppression of freedom of expression, and abuse of power by those in power that threaten democratic principles. Internal and external factors that contributed to the collapse of democracy in Indonesia. Among the internal factors are abuse of power, corruption, and the inability of institutions to provide adequate protection for citizens' rights. Meanwhile, external factors include geopolitical pressures and the influence of globalization on domestic politics. Such as political polarization that triggers conflict, lack of active participation from civil society, and lack of consolidation of democratic institutions.

Keywords: Democracy, General Elections

Abstrak. Demokrasi Indonesia telah menjadi pusat perdebatan yang intens dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak pihak mengkritik kondisi demokrasi yang semakin rapuh dan terancam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mengapa demokrasi Indonesia dianggap hancur oleh sebagian pihak. Pertama, analisis dimulai dengan memeriksa penurunan kualitas demokrasi yang tercermin dalam klasifikasi demokrasi Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahannya. Data yang menunjukkan penurunan kebebasan sipil, penindasan terhadap kebebasan berpendapat, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa yang mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Faktor-faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap keruntuhan demokrasi di Indonesia. Di antara faktor internal adalah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketidakmampuan institusi untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak warga. Sedangkan faktor eksternal termasuk tekanan geopolitik, dan pengaruh globalisasi terhadap politik dalam negeri. Seperti polarisasi politik yang memicu konflik, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat sipil, serta kurangnya konsolidasi institusi demokrasi.

Kata kunci: Demokrasi, Pemilihan Umum

LATAR BELAKANG

Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang dipilih Negara Negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir atas dasar tuntutan masyarakat atas kesetaraan pada kedudukan bernegara, Menurut Encyclopaedia Britannica, demokrasi secara harafiah dikuasai oleh rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti pemerintahan rakyat. Demokratia berasal dari kata demos yang artinya manusia dan kratos yang artinya pemerintahan. Pada pertengahan abad 5 SM, istilah demokrasi untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara-kota Yunani, terutama di Athena. demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Istilah ini digunakan untuk berbagai bentuk pemerintahan di mana orang dapat mengambil bagian dalam keputusan yang memengaruhi cara komunitasnya dijalankan.

Di Indonesia sendiri demokrasi diawali dengan pemikiran anak muda abad-20. Mengutip dari buku “Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia” (2012) yang ditulis oleh Nadhirun, pada awalnya demokrasi Indonesia muncul pada abad 20 pada masa penjajahan belanda, dimana masyarakat indonsia telah melihat bagaimana demokrasi pada belanda, namun pada saat itu generasi muda banyak juga mengenal dan membaca demokrasi dalam buku buku eropa pada ruang terbuka. Sehingga anak muda saat itu menemukan ketidak sesuaian demokrasi pada belanda dan eropa. Sehingga generasi muda yang paling dikenal saat itu adalah Bung Hatta yang dikenal sebagai wapres pada era kemerdekaan.

Hingga sekarang demokrasi tetap menjadi bentuk pemerintahan Indonesia, namun belakangan ini, tepatnya pada masa pemilu 2024 banyak polemic yang menyandingkan demokrasi dalam permasalahannya. Hingga banyak juga perdebatan yang dilakukan oleh tokoh, pimpinan partai, dan pengamat politik yang membahas tentang krisis demokrasi yang didapatkan Indonesia karna terindikasi ada kecurangan dalam pemilu dan putusan MK tentang batasan umur bagi para paslon presiden. Hal ini bahkan membuahkan sebuah pemberhentian seorang hakim dari MK yaitu Anwar utsman, ini dikonfirmasi juga dalam berita yang dimuat oleh kompas “Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi dalam uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Atas pelanggaran itu, Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)”, yang dalam hal ini berkaitan dengan isu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh presiden RI ke-7 atas pencalonan anaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang dalam aturan pilpres sebelumnya tidak mencapai batas minimum pencalonan capres. Yang dimana Anwar Utsman sendiri adalah adik ipr dari presiden jokowi, sehingga public mencurigai ini adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh jokowi.

Hingga hari ini per tanggal 6 Mei 2024, telah dilaksanakanya pemilu, dan berakhir dengan kemenangan paslon 2, yaitu Prabowo Gibran. Namun demikian upaya pemerintah untuk mengambil kepercayaan public kembali bahwa demokrasi baik saja di Indonesia, dan upaya dari masa yang tidak terima dengan kecurangan ini untuk menurunkan gugatan demi gugatan dan mosi demokrasi Indonesia diambang kehancuran.

Dengan demikian peneliti berupaya untuk membahas tentang permasalahan ini, yang sampai sekarang masih berlarut larut, guna mendapatkan jawaban yang sebenarnya berdasarkan data dan pemberitaan yang factual.

KAJIAN TEORITIS

Demokrasi

Demokrasi berasal dari Athena pada abad ke-5 sebelum masehi, demokrasi berarti pemerintahan yang dikembalikan pada rakyat. Yang berasal dari bahasa Yunani dari “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yaitu pemerintahan.

Demokrasi lalu berkembang sesuai perkembangan jaman, yang sering disebut demokrasi modern. Demokrasi modern ini terjadi pada abad ke-18 ketika perang saudara di Inggris, Konstitusi Kepulauan rhode 1641 dengan Konstitusi Amerika 1788.

Dan terjadi juga di Prancis, yang sering disebut dengan Revolusi Prancis pada tahun 1789, yang menjadikan amanat demokrasi menjadi sangat baik yairu untuk menuju Negara berkedaulatan rakyat.

Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan satu dari praktik demokrasi yang melibatkan rakyat pada pemilihan pemerintahnya. Dan menjadikan masyarakat sebagai pelaku politik itu sendiri.

Pemilu adalah bentuk nyata dari demokrasi, namun demokrasi dan pemilihan umum adalah tidak sama, demokrasi adalah system dan pemilihan umum adalah bentuk dari salah satu system demokrasi. Pemilihan umum menjadi salah satu bentuk nyata demokrasi, demokrasi dan pemilihan umum adalah satu kesatuan dalam pelaksanaan pemerintah yang transparan yang dikembalikan pada rakyat, untuk bebas memilih siapa pemimpinnya.

METODE PENELITIAN

Pemelitian dilakukan dengan kualitatif sekunder, pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari jurnal, artikel, dan beberapa website lainnya. Pendekatan ini mengoptimalkan penelitian dengan data data yang sebelumnya berupa teks, dan dengan pendekatan tersebut peneliti pengumpulan guna mencari konsep yang diinginkan. Dalam ilmu social penelitian dengan konsep ini sering digunakan guna mendukung peneliti primer, mengevaluasi uang peneliti sebelumnya. Dengan memanfaatkan penelitian sebelumnya, penelitian ini dapat memaksimalkan sumber informasi relevan yang terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi di Indonesia

1. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia

Dimulai dari abad ke-20 demokrasi Indonesia sudah masuk yang berbarengan dengan penjajahan dari belanda, dan demokrasi modern sudah masuk kedalamnya. Dengan anak anak muda Indonesia yang bersekolah diluar negri atau eropa, yang kembali dengan membawa

konsep demokrasi modern di Indonesia dan membuka diskusi di ruang public pada saat itu. Dan anak muda generasi saat itu adlah bung Hatta.

a. Demokrasi Parlementer (1945 - 1959)

Demokrasi parlementer yaitu menempatkan parlemen pada posisi sentral dalam pemerintahan Indonesia. Kemudian pada masa ini juga dikenalah pemilu perama yang diikuti oleh 30-an partai politik pada saat itu. Dan anggota pemerintahan tidak diizinkan untuk menggiring opini public pada selera pemilihan.

b. Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)

Demokrasi ini menempatkan pada kepala pemerintah atau presiden sebagai pemegang segala keputusan, yang bermula pada kepemimpinan presiden Soekarno yang mengeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 juli 1959.

c. Demokrasi Pancasila era Orde Baru (1965 - 1998)

Setelah pergantian presiden dari Soekarno pada Soeharto, yang dikenal setelah tragedi G30SPKI, bergantilah demokrasi pada system yang merujuk pada pancasila sebagai identitas demokrasinya. Yang bertahan selama 32 tahun.

d. emokrasi Reformasi (1998 - sekarang)

Pada era demokrasi 98 dikembalikanlah demokrasi pada kondisi seharusnya. Seperti keebasan pers, pemilu dan lainnya.

2. Kondisi demokrasi Indonesia menjelang pemilu 2024

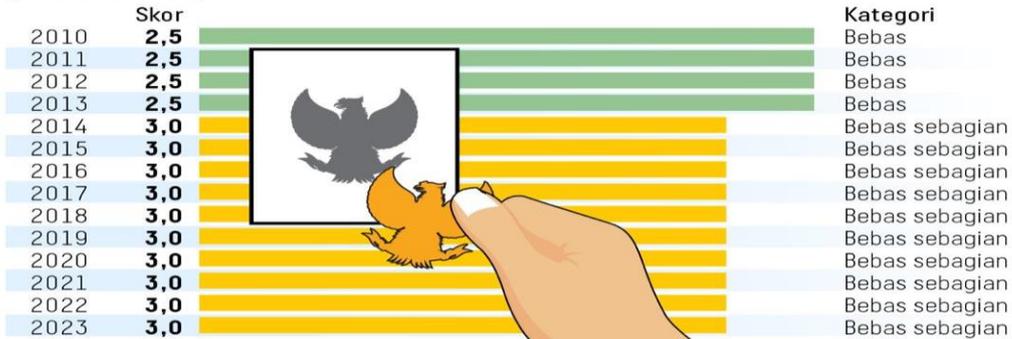
Pada pemilihan umum 2024 menjadi momentum penentu demokrasi Indonesia kedepanya, kualitas demokrasi Indonesia kedepan akan dipertaruhkan pada siapa pemimpin selanjutnya untuk Indonesia 5 tahun kedepan.

Dalam kondisi ini demokrasi Indonesia cenderung menurun, melihat 3 penilaian dari Freedom House, The Economic Intellegence Unit, dan Indeks Demokrasi Indonesia. Yang menilai ketidak stabilan demokrasi idonesia sejak 2014 yang berada pada demokrasi bebas sebagian, yang sebelumnya masuk pada bebas dengan skor 2.5.

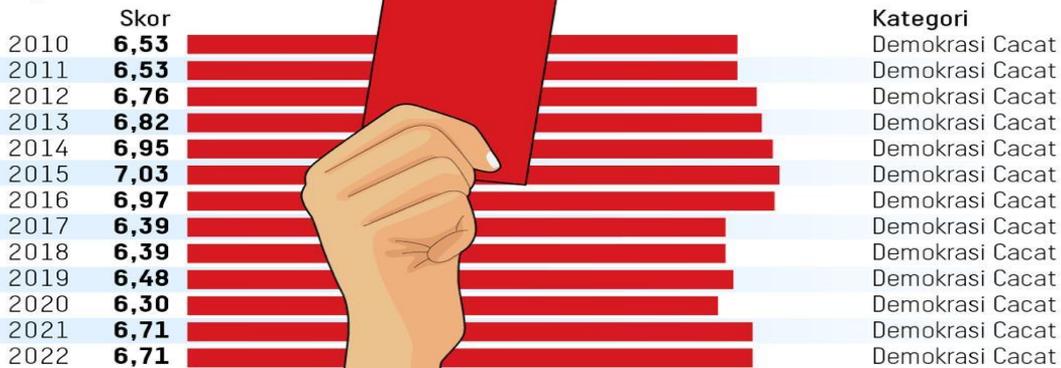
Dalam konteks lain dari The Economic Intellegence Unit mengatakan demokrasi Indonesia dalam keadaan “cacat” dari tahun 2010-2022. Dan menurut Indeks Demokrasi Indonesia, demokrasi Indonesia per tahun 2010-2022 dalam kondisi yang sedang dan baik.

Indeks Demokrasi Indonesia

*Freedom in The Worlds
(Freedom House)*



**Democracy Index
(EIU)**



**Indeks Demokrasi
Indonesia**



Penghitungan metode baru

Sumber : diolah Dari Freedom House, Democracy Index, dan Indeks Demokrasi Indonesia.

Gambar 1. Indeks Demokrasi Indonesia

Jika bisa ditarik benang merah antara ketiga pengukuran di atas, demokrasi di Indonesia memang belum masuk pada tahap yang stabil dan terkonsolidasi dengan baik. Sejumlah

peristiwa politik dan hukum kerap menjadi "beban" bagi jalannya proses demokrasi di Indonesia.

Sepanjang 2023, misalnya, bagaimana sorotan publik pada institusi hukum yang dibalut politik cukup mewarnai sehingga isu pada erosi demokrasi Indonesia makin mencuat.

Dua isu yang cukup menyita perhatian publik adalah terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap putusan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang membuat heboh publik.

Isu lain adalah soal pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kian hari makin menurun akibat kasus hukum yang menjerat ketuanya. Dalam catatan Litbang Kompas, dua lembaga hasil dari buah reformasi ini pun cenderung merosot citranya.

Sorotan publik ini tidak lepas dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden adalah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Kalimat "pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada" inilah yang kemudian dijadikan pintu masuk bagi siapa pun kepala daerah, meskipun usianya belum genap 40 tahun, untuk maju menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden.

Putusan ini pula yang kemudian menjadi karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Surakarta, maju menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.

Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang telah dewasa menurut UUD, dan pemilu di Indonesia sendiri menjadi salah satu kegiatan penting pendidikan politik, dan seberapa peduli masyarakat pada dunia perpolitikan saat ini.

1. Sejarah Pemilihan Umum

Dikutip dari laman KPU pemilu adalah mekanisme dimana perpindahan kekuasaan terjadi yang dilakukan oleh akumulasi dari banyaknya pemilih dari masyarakat bagi beberapa paslon terdaftar.

a. Pemilihan Umum Tahun 1955

Pada masa ini pemilu tertunda karna belum adanya undang undang yang mengatur, factor keamana, dan focus pada mempertahankan kedaulatan. Pada pemilu ini diikuti oleh 30 an partai dan diikuti oleh lebih dari 100 calon perorangan. Dengan dikeluarkanya dekrit presiden Ir Soekarno pada saat itu.

b. Pemilihan Umum Tahun 1971

Pemilu kedua seharusnya dilaksanakan pada tahun 1958 dan terlaksana pada 1971 dengan alasan keamanan ini diikuti oleh 10 partai politik dan satu ormas, yang berlangsung untuk pemilihan DPR dan DPRD. Dengan hasil Golkar sebagai pemegang suara mayoritas.

Lalu dilaksanakanya siding MPR dibulan maret 1973, yang menyatakan Soeharto dan Sri Sultan Hamangkubuno IX Presiden dan Wakilnya. Dan diikuti tahun 1977 yang berlangsung pemilihan umum dan menandai pemilihan umum dilaksanakan pada 5 tahun sekali.

c. Pemilihan Umum 1982, 1989, 1992, dan 1997

Setelah masa orde baru, pemilu selalu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk DPR dan DPRD, lalu Presiden akan dilantik melalui siding MPR. Pada pemilihan umum periode ini selalu saja Golkar memenangkan suara terbanyak dan melalui siding MPR Soeharto terpilih menjadi presiden dari 1982-1997, dan menjadikanya presiden yang menjabat terlama, yaitu 32 tahun.

d. Pemilihan Umum 1999

Pada masa ini, masa yang sering dikenang dengan istilah “reformasi” setelah digulingkanya Presiden Soeharto, pemilu yang tadinya akan dilaksanakan pada tahun 2002 dipercepat menjadi 7 juni 1999, yang diikuti oleh 58 partai.

Sebanyak 48 partai dan yang mendapat kursi di DPR adalah 21 partai dengan PDIP sebagai pemegang suara mayoritas, lalu dilantiknya Abdurrahman Wahid – Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden dan Wakilnya dari hasil siding umum MPR.

Lalu estapet kepemimpinan diberikan pada Megawati Soekarnoputri – Hamzah Haz melalui siding istimewa MPR RI pada tanggal 23 juli 2001, akibat diturunkanya Gusdur.

e. Pemilihan Umum 2004

Pada periode ini masyarakat Indonesia dibebaskan dan dilibatkan untuk tidak hanya memilih DPR dan DPRD saja, namun Presiden dan wakilnya, dan DPD dilaksanakan serentak dalam pemilihannya. Dan dibentuklah system baru yang diatur oleh KPU.

2. Pelaksanaan Pemilihan Umum Indonesia 2024

Pelaksanaan pemilu 2024 telah dilaksanakan pada 14 February 2024, dengan berbagai dinamika terkait kubu pro terhadap revisi UU Pemilu dan yang kontra. Namun pada akhirnya pelaksanaan pemilu tetap dilaksanakanserentak dengan Pilkada dan Pileg. Semua paslon

mengikuti dan menaati pelaksanaan dengan baik. Yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran KPU RI yang diumumkan pada Rabu (20/3/2024). Hasil Pilpres 2024 tersebut ditetapkan berdasarkan berita acara KPU nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024.

Kemenangan tersebut tentu tidak dengan begitu saja mulus, selalu terjadi sengketa antara paslon yang kalah dan menang. sengketa tersebut diajukan banding kepada MK, dan pelaksanaannya diatur oleh peraturan MK no 1 tahun 2024 tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara.

Pada akhirnya sengketa tersebut ditolak, dengan dalil segala gugatan kecurangan dalam pemilu tidak beralasan menurut hukum, putusan ini dilakukan pada tanggal 22 april 2024, di Gedung MK Medan Barat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa kondisi demokrasi Indonesia memang belum seimbang dan menunjukkan pada keinginan demokrasi sesungguhnya, terbukti dengan cara pemilihan umum yang kita dipaksa untuk memilih beberpa kandidat saja yang diusung partai dengan aturan nya. Maka demikian kondisi demokrasi Indonesia memang belum sepenuhnya stabil, namun demikian demokrasi Indonesia terus juga tumbuh mencari jati diri demokrasi versi indonesianya sendiri, ditengah masyarakat yang begitu majemuk dan slalu saja memiliki perbedaan pemahaman dan tujuan. Maka demokrasi Indonesia sangat kompleks.

Demikian pada demokrasi Indonesia baru-baru ini setelah terlaksananya pemilu 2024 yang banyak pihak yang menyuarakan ketidak benaran/ kecurangan pada pemilu yang akan berimbas pada demokrasi kedepan, maka itu adalah buah dari kecurangan yang terjadi akibat penetapan peraturan baru tentang batas usia capres, dan pencalonan Gibran sebagai cawapres. Maka itu adalah sah sah saja, mengingat memang benar adanya dengan bukti penetapan pelanggaran kode etik oleh anwar utsman sebagai salah satu hakim MK.

Maka kondisi demokrasi Indonesia memang kurang stabil, dari masa ke masa. Ditambah dengan polemic sengketa pemilu. Semakinlah *parno* masyarakat Indonesia pada kondisi demokrasi Indonesia kedepan. Maka istilah keterancaman demokrasi Indonesia setelah pemilu adalah bukan buakan semata, ini bisa jadi kenyataan namun bisa jadi kesalah fahaman.

Maka dari itu marilah menjadi warga Negara yang baik dan tetap peduli pada iklim politik Indonesia, mari terus mengkritisi segala kebijakan pemerintah dan terus menjadi alarm demokrasi bilamana demokrasi dilangkahi oleh pemangku kebijakan.

DAFTAR REFERENSI

- Yohan Wahyu. (2024). Pemilu 2024 Dan Pertaruhan Demokrasi Indonesia. Analisis Komparatif. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/16/pemilu-2024-dan-pertaruhan-demokrasi-indonesia>
- Rafi, A. M. (2022). Sejarah Demokrasi Di Indonesia Dan Perkembangannya Dari Masa Ke Masa. DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243165/sejarah-demokrasi-di-indonesia-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masa>
- BPSRI. (2021). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator, 2018-2020. Jakarta. Diakses Dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/njm4izi=/indeks-demokrasi-indonesia--idi--menurut-indikator.html>
- Candra, N. (2024). Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli- Tujuan, Fungsi Lengkap. Diakses Dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/njm4izi=/indeks-demokrasi-indonesia--idi--menurut-indikator.html>
- Dwi, L, F. (2021). Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli Dan Sejarahnya. Diakses Dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/61ba2aca6c3bc/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli-dan-sejarahnya>
- Fierna Janvierna Lusie Putri, R. R. (2022). Tinjauan Sosiologis Terhadap Partisipasi Politik Dalam Sistem Politik Di Indonesia . Wiyatamandala : Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran, 221.
- Sidni, A. (2022). Optimalisasi Peran Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Dan Tatanegara Demokrasi Indonesia Kedepan. Jurnal Politik. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech/article/view/5002>
- R, Siti, Z. (2019). Demokrasi Dan Pemilu 2019. Jurnal Politik. Diakses Dari <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/782a2dejourcfffedc350294>
- Ilham, S, J. (2020). Dinamika Sikap Arcisstic Demokrasi Mahasiswa Dalam Demokrasi Indonesia. Jurnal UNISMUH. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/3012>
- I,R, Koho. (2021). Oligarski Demokrasi Indonesia. Jurnalunpri. <https://jurnalunpri.ac.id/index.php/lo/article/view/6>
- E, Susanto. (2021). Sila Ke Empat Dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini. Jurnal Undip. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/31538>
- Ninis, C. Perjalanan Sengketa Pilpres 2024 Di MK, Dari Pendaftaran Hingga Putusan. Diakses Dari <https://nasional.tempo.co/read/1859625/perjalanan-sengketa-pilpres-2024-di-mk-dari-pendaftaran-hingga-putusan>